

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif

¹Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.²

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.³

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:⁴

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

²*Ibid*, h. 4.

³*Ibid*, h. 5.

⁴*Ibid*, h. 5-6.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:⁵

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan ber laba
- 5) Pencarian sumber daya

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:⁶

- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

⁵*Ibid*, h.7.

⁶ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.53.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam pemberdayaan ekonomi pesantren di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin.

3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:⁷

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.⁸

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas

⁷Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8-10.

⁸*Ibid*, h. 8.

juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.⁹ Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.¹⁰

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara

⁹*Ibid*, h. 9.

¹⁰*Ibid*, h. 10.

terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

B. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Kata pondok berasal dari *funduq* (bahasa arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya.¹¹ Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, keaslian (*indigenous*) Indonesia. Sesuai undang-undang no 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan rahmat Tuhan yang maha Esa. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang otonom, baik dari sistem pembelajaran maupun pendanaan.¹² Jadi, pondok pesantren dapat diartikan tempat tinggal sekaligus tempat para santri menimba ilmu khususnya ilmu agama.

Pendidikan ini muncul sejak abad ke 13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantren.¹³

¹¹ Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1928), h.18.

¹² Irwan, Zain dan Hasse, *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.124.

¹³ Sulthon Masyud, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Dipa Pustaka, 2005), h.1.

Pondok pesantren menerapkan prinsip *tasamuh* (toleran), *tawasth wal I'tidal* (sederhana), *tawazun* (penuh pertimbangan), dan *ukhuwah* (persaudaraan).¹⁴ Tujuan umum Pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikan sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.¹⁵

Oleh sebab itu Pondok Pesantren sangat di anjurkan kepada warga Negara muslim, sebab pembelajaran yang berada di pondok pesantren bertujuan untuk membimbing warga Negara muslim untuk berperilaku sesuai ajaran agama Islam.

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan *mubaligh* yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh dan dinamis.
- c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga santri pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat sekitar).

¹⁴ Syawaludin, *Peranan Pengasuh Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai di Provinsi Gorontalo*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), h.132.

¹⁵ Qomar Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h.5.

- e. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan.
- f. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.¹⁶

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa tujuan didirikannya pondok pesantren yaitu untuk menjadikan generasi anak muda menjadi yang lebih baik lagi dan mensejahterakan lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, pesantren telah terlibat dalam membangun negara dan mengisi pembangunan sebagai pusat perhatian pemerintah. Hanya saja dalam kaitan dengan peran tradisionalnya, memiliki tiga peran penting dalam masyarakat Indonesia :

1. Sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional.
2. Sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional.
3. Sebagai pusat reproduksi ulama.¹⁷

Lebih dari itu, pesantren tidak hanya memainkan ketiga peran tersebut, tetapi juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya.¹⁸ Sebagaimana telah dijelaskan tujuan pesantren, maka kita dapat mengetahui bahwa pesantren bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu agama saja namun lebih jauh lagi para santri dididik dan

¹⁶ *Ibid*, h. 6.

¹⁷ *Ibid*, h. 26.

¹⁸ *Ibid*, h. 27.

dibentuk untuk menjadi insan yang paham agama, namun dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat, cerdas dalam ilmu pengetahuan serta dapat menjadi makhluk sosial yang produktif.

2. Unsur-unsur Pondok Pesantren

Unsur-unsur pondok pesantren adalah sebagai berikut :

a. Kyai

Kyai merupakan konotasi secara kebudayaan sebagian orang yang mempunyai keahlian tentang Islam, dimuliakan dan menguasai daerah pengaruh. Istilah “kyai” sering digunakan secara bergantian dengan “ulama” merujuk pada sosok guru yang ada di pesantren.¹⁹

Istilah kyai sendiri memiliki pengertian yang plural. Kata kyai bisa berarti:

- 1) Sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam)
- 2) Sebutan bagi guru ilmu ghaib (dukun dan sebagainya)
- 3) Alim ulama
- 4) Kepala distrik di Kalimantan Selatan
- 5) Sebutan bagi benda yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dan sebagainya)
- 6) Sebutan samaran untuk harimau (jika orang melewati hutan).²⁰

Dari penjelasan di atas seorang kyai dapat di artikan sebagai seseorang panutan atau ulama yang sangat di hormati oleh para guru atau anak murid yang didik oleh kyai. Kyai juga memiliki peran dan *skill* kepemimpinan yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi.

¹⁹ Zamakhsyari Dhofir, *Op.Cit*, h.51

²⁰ Qomar, Mujamil, *Op.Cit*, h. 20.

Menurut asal usulnya, perkataan kyai dalam Bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda:

- a) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, seperti “kyai Garuda Kencana” dipakai untuk menyebut kereta emas yang ada di Keraton Yogyakarta.
- b) Gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya.
- c) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau memimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Selain gelar kyai, ia juga disebut sebagai alim.²¹

Dapat di simpulkan kyai juga dapat di artikan sebagai seorang ahli agama yang sangat di hormati oleh para santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren.

Dengan kaitannya yang sangat kuat dengan tradisi pesantren, maka gelar kyai biasanya dipakai untuk menunjuk para ulama dari kelompok Islam tradisional. Kemudian dalam manajemen Islam setiap orang memiliki sisi-sisi yang kadangkala menyatu dalam dirinya. Oleh karena itu, ada beberapa tipe pemimpin yang baik menurut manajemen Islam diantaranya:

- i) Ketegasan. Jika seorang pemimpin mengatakan sesuatu itu A dengan argumentasi yang jelas, maka harus disepakati bahwa itu A. Pemimpin yang sangat dibutuhkan sekarang adalah pemimpin yang mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap.

²¹ Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), h. 59.

- ii) Musyawarah. Bermusyawarah esensinya adalah saling bertukar pendapat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu bertukar informasi dengan bawahannya dan mendengar keluhan-keluhannya.
- iii) Keterbukaan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu transparan dan terbuka dalam segala hal menyangkut pekerjaan dan kebijakan, bahkan juga menyangkut keuangan dan gizi serta penghasilan.
- iv) Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Visi dan misi organisasi harus dipahami benar oleh seorang pemimpin agar organisasi itu berjalan dengan baik.²²

Kyai dapat di katakan pemimpin yang baik apabila kyai dapat mempunyai sifat ketegasan dalam mengambil keputusan, musyawarah atau saling bertukar pendapat, keterbukaan antara pekerjaan dan pemahaman yang mendalam terhadap organisasi.

Adapun fungsi kepemimpinan antara lain: *Pertama*, fungsi instruksi. Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. *Kedua*, fungsi konsultatif. Komunikasi ini berlangsung dan bersifat dua arah, meskipun pada pelaksanaannya tergantung pada pihak pemimpin. *Ketiga*, fungsi partisipatif. Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dan bersifat dua arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dengan dan sesama orang yang dipimpin. Dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan

²²Rizal Muttaqin, "Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren". Jurnal *Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2011), h. 9.

keputusan maupun pelaksanaannya. *Keempat*, fungsi delegatif. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemimpin. *Kelima*, fungsi pengendalian. Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah, meskipun tidak mustahil untuk dilakukan dengan cara komunikasi dua arah. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif.²³

Suatu kepemimpinan berjalan efektif apabila memenuhi lima fungsi di atas yaitu fungsi instruktur, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, fungsi delegatif dan fungsi pengendalian. Karena, apabila kepemimpinan tidak menerapkan salah satu fungsi di atas, maka kepemimpinan belum berjalan sukses atau belum efektif.

b. Pondok

Pondok merupakan ciri khas tradisi pesantren dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai. Asrama atau pondok berada dalam lingkungan kompleks pesantren, dimana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Komplek pesantren biasanya dikelilingi oleh tembok agar para santri dapat diawasi keluar dan masuknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁴

Pondok pesantren dapat di pahami sebagai lembaga agama pendidikan dan pengajaran agama, dimana seorang kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri, dan santri bertempat tinggal di dalam pondok pesantren tersebut.

²³*Ibid*, h. 10.

²⁴ Zamakhsyari Dhofir, *Op.Cit*, h.45.

c. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren karena masjid merupakan pusat pendidikan dalam tradisi pesantren. Masjid mempunyai fungsi sebagai manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Bagi lingkungan umat Islam, masjid merupakan jantung kehidupan yang mencakup segala aspek, mulai dari pendidikan, ritual ibadah, hingga muamalah. Begitupun fungsi masjid bagi lingkungan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam utama di Nusantara. Bahkan embrio kelahiran suatu pesantren besar tak bisa dipisahkan dari aktivitas pengajian ilmu-ilmu agama yang digelar di serambi-serambi masjid atau bilik surau-surau kecil. Masjid tidak hanya menjadi ruang dimana kyai mengajar santri, atau kyai mengimami shalat jamaah, tetapi juga menjadi media dakwah dan bersosial dengan masyarakat setempat.²⁵

Masjid di pondok pesantren tidak hanya berfungsi tempat shalat lima waktu, tetapi lebih dari itu, masjid memiliki peran strategis dalam proses pendidikan dan pembelajaran di pesantren.

d. Santri

Sebuah pesantren tidak dapat dikatakan pesantren jika tidak ada santri, karena santri merupakan komponen penting untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Menurut tradisi pesantren terdapat dua santri yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok pesantren tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya bersal dari daerah-

²⁵*Ibid*, h. 46.

daerah sekitar pesantren jadi tidak keberatan untuk sering pergi pulang. Sedangkan santri mukim merupakan putra dan putri yang menetap dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah pesantren yang jauh merupakan suatu keistimewaan untuk santri karena dia harus penuh cita-cita, memiliki keberanian yang cukup dan siap menghadapi sendiri tantangan yang akan dialaminya di pesantren.²⁶

e. Pengajaran Kitab-kitab Islam Klasik

Zaman sekarang kebanyakan pesantren telah memasukan pelajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan pesantren. Namun, pengajaran kitab-kitab klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren mendidik calon-calon ulama. Kitab-kitab klasik yaitu: Pertama kitab Al-Ajrumiyah yaitu kitab dasar yang mempelajari ilmu nahwu, Kedua kitab Amsilah At-Tashrifah yaitu salah satu kitab yang paling dasar yang mempelajari ilmu shorof, Ketiga kitab Mushtholah Al-hadist yaitu mempelajari ilmu mengenai seluk beluk ilmu hadist, Keempat kitab Arba'in Nawawi yaitu kitab dasar dalam menspesifikasi kedudukan hadist, Kelima kitab At-Taqrib yaitu hasil dari turunan Al-Quran dan Al-Hadist setelah melalui berbagai panduandalam ushul fiqh, Keenam kitab Aqidatul Awam adalah kepercayaan aqidah, Ketujuh kitab Ta'ilmu Muta'alim yaitu sependai apapun

²⁶*Ibid*, h. 49.

manusia serta sebanyak apapun ilmu yang di kuasai, semuanya tidak akan bisa menghasilkan sarinya ilmu tanpa adanya akhlaq.²⁷

3. Tipe-tipe Pondok Pesantren

Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat, yaitu :²⁸

a. Pondok Pesantren Tradisional

Pondok pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke 15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem *halaqoh* yang dilaksanakan di masjid atau surau. Hakekat dari sistem pembelajaran *halaqoh* adalah penghapalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu. Artinya ilmu itu dapat berkembang ke arah paripurnanya ilmu itu, melainkan hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh kyainya. Kurikulumnya tergantung sepenuhnya kepada para kyai pengasuh pondoknya. Santrinya ada yang menetap di dalam pondok (santri kalong).²⁹

Pada perkembangannya, pondok pesantren tidaklah semata-mata tumbuh atas pola lama yang bersifat tradisional, melainkan dilakukan suatu inovasi dalam pengembangan suatu sistem. Dengan demikian, agama Islam semakin tersebar

²⁷ Sulton Masyhud, dkk, *Tipologi Pondok Pesantren*, (Jakarta: Putra Kencana, 2006), h.89.

²⁸Ghazali, Bahri, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), h.92-97.

²⁹*Ibid*, h.92.

sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan pesantren merupakan anak panah penyebaran Islam.³⁰

Pondok pesantren tradisional yaitu di pesantren belum banyak yang mampu merumuskan visi, misi dan tujuan pendidikan secara sistematis, dan dalam merespon perubahan cenderung sangat lamban. Contoh pondok pesantren tradisional yaitu sistem pengajarannya kurang efisien, demokratis dan variatif, sehingga cepat memunculkan kejenuhan pada peserta didik.

b. Pondok Pesantren Modern

Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Penerapan sistem belajar moder ini terutama nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Santrinya ada yang menetap ada yang tersebar di sekitar desa itu. Kedudukan para kyai sebagai koordinator pelaksana proses belajar mengajar.³¹

Pondok pesantren modern yang mengajarkan pendidikan umum, di mana persentase ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu umum (matematika, fisika, dan lainnya). Contoh pondok pesantren modern yaitu di pondok pesantren terdapat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Bedanya hanya saja SMP dan SMA tinggal di asrama sedangkan SD tidak tinggal di asrama.

³⁰*Ibid*, h.94.

³¹*Ibid*, h.95.

c. Pondok Pesantren Komprehensif

Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara pondok pesantren tradisional dengan pondok pesantren modern. Artinya di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab salaf dengan metode sorogan, bandongan dan wethonan, namun secara reguler sistem persekolahan terus dikembangkan.³²

Pondok pesantren komprehensif yaitu pondok pesantren yang sistem pendidikan dan pengajarannya gabungan antara tradisional dan modern. Contohnya yaitu pendidikan di dalam pondok pesantren komprehensif dan pengajarannya kitab kuning dengan metode sorongan, namun secara reguler sistem persekolahan terus dikembangkan.

4. Manajemen Pesantren

Lembaga pendidikan Islam yang paling variatif adalah pesantren, mengingat adanya kebebasan dari kyai pendirinya untuk mewarnai pesantrennya itu dengan penekunan pada kajian tertentu. Ditinjau dari segi keretbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari luar, pesantren dapat dibagi dua yakni : pesantren tradisional (*salaf*) dan pesantren modern (*khalaf*). Pesantren salafi bersifat konservatif, sedangkan pesantren khalafi bersifat adaptif. Adaptasi dilakukan terhadap perubahan dan pengembangan pendidikan yang merupakan akibat dari tuntutan perkembangan sains dan teknologi.³³

Kebanyakan dari pesantren menerapkan pola manajemen yang berorientasi pada penanaman jiwa ketulusan, keikhlasan, dan kesukarelaan. Konsep tersebut

³² *Ibid*, h.97.

³³ Qomar Mujamil, *Op.Cit*, h.58.

menjiwai hampir semua aktifitas di pesantren. Hanya saja konsep tersebut pada masalah banyak memiliki kelemahan, utamanya disebabkan karena tidak diimbangi kemampuan dan profesionalisme yang memadai. Meski tidak dapat dipungkiri, konsep tersebut dapat menjadi modal dasar utama dalam kehidupan dan eksistensi pesantren. Seiring dengan perkembangan saat ini, modal dasar utama tersebut masih sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi pesantren. Namun demikian, konsep pengembangan manajemen pesantren harus lebih akomodatif terhadap perubahan yang serba cepat dalam era global saat ini.³⁴

Masa depan pesantren sangat ditentukan oleh faktor manajerial. Pesantren kecil akan berkembang secara signifikan manakala dikelola secara profesional. Dengan pengelolaan yang sama, pesantren yang sudah besar akan bertambah besar lagi. Sebaliknya, pesantren yang telah maju akan mengalami kemunduran manakala manajemennya tidak terurus dengan baik. Sementara itu, jika mengabaikan manajemen, pesantren yang kecil akan gulung tikar dalam menghadapi tantangan multidimensi.³⁵

Oleh karena itu, dibutuhkan solusi-solusi yang lebih komprehensif dan menyebar keberbagai komponen kepesantren yang selama ini menjadi titik balik kelemahan pesantren. Kemudian diikuti langkah-langkah praktis agar segera dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait langsung dengan penataan pesantren. Solusi beserta langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan manajemen secara profesional. Hal ini dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut ini :

³⁴ Zainal, Abdullah, *Agama Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), h.124.

³⁵Qomar Mujamil, *Op.Cit*, h.63.

- 1) Menguasai ilmu dan praktik tentang pengelolaan pesantren
 - 2) Menerapkan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan
 - 3) Mampu menunjukkan skill yang dibutuhkan pesantren
 - 4) Memiliki pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai tantangan pengelolaan
 - 5) Memiliki kewajiban moral untuk memajukan pesantren
 - 6) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan pesantren.
- b. Menerapkan kepemimpinan yang kolektif. Strategi ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut ini :
- 1) Mendirikan yayasan
 - 2) Mengadakan pembagian wewenang secara jelas
 - 3) Memberikan tanggung jawab kepada masing-masing pegawai
 - 4) Menjalankan roda organisasi bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak secara kolektif
 - 5) Menanggung resiko secara bersama-sama.³⁶
- c. Menerapkan manajemen terstruktur. Strategi ini dapat dilalui dengan langkah-langkah berikut ini :
- 1) Menyusun struktur organisasi secara lengkap
 - 2) Menyusun deskripsi pekerjaan (*job description*)
 - 3) Menjelaskan hubungan kewenangan antar pegawai dan pimpinan, baik secara vertikal maupun horizontal (bertanggung jawab kepada siapa,

³⁶ *Ibid*, h.59.

- bermitra kerja kepada siapa, dan memiliki kewenangan memerintah siapa)
- 4) Menanamkan komitmen terhadap tugas masing-masing pegawai
 - 5) Menjaga kode etik kewenangan masing-masing pegawai.
- d. Mengadakan pembaruan secara berkesinambungan. Strategi ini dapat diaplikasikan melalui langkah-langkah berikut :
- 1) Mengadakan pembaruan dan penambahan institusi
 - 2) Mengadakan pembaruan sistem pendidikan
 - 3) Mengadakan pembaruan sistem kepemimpinan
 - 4) Mengadakan pembaruan sistem pembelajaran
 - 5) Mengadakan pembaruan sistem strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran
 - 6) Memperkuat SDM para ustadz, perpustakaan, dan laboratorium.³⁷
- e. Mengebangkn sentra-sentra perekonomian. Strategi ini dapat diaplikasikan melalui langkah-langkah berikut :
- 1) Mendirikan toko-toko yang menyediakan kebutuhan para santri
 - 2) Mengelola konsumsi para santri
 - 3) Mendirikan koperasi
 - 4) Mendirikan pusat-pusat pelayanan publik yang berorientasi.³⁸

Manajemen pesantren sangat penting bagi pondok pesantren oleh karena itu manajemen harus di kelolah secara profesional, agar pesantren tidak mengalami kemunduruan dan terus berjalan dengan baik.

³⁷ *Ibid*, h.76.

³⁸ *Ibid*, h.79.

C. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari bahasa Inggris *Empowerment*, pemberdayaan berasal dari kata dasar *power* yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.³⁹ Pemberdayaan berasal dari kata *power* yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.⁴⁰ Jadi dengan kata lain pemberdayaan merupakan suatu aspek yang digunakan manusia untuk mengolah suatu sumber daya dengan sebaik mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif.

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai ketahanan nasional.⁴¹

³⁹Lili Bariadi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Yogyakarta : CED (Center for Entrepreneurship Development), 2005), h.53.

⁴⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung : Ptrevika Aditam, 2005), h.57.

⁴¹Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263-264

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas menggunakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁴²

Pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.⁴³ Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam Al-Quran tentang pemberdayaan *dhu'afa*, *community empowerment* (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.⁴⁴

⁴²*Ibid*, h. 264.

⁴³Agus Ahmad Syafi'I, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung : Gerbang Masyarakat Baru, 2005), h.70.

⁴⁴Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*, (Jakarta : Dakwah Press, 2009), h.9.

Masih dalam pengalaman Al-Quran, pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih baik.⁴⁵ Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumoharjodiningrat adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum *dhu'afa* dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubsh untuk mengembangkannya.⁴⁶

2. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.⁴⁷

Pemberdayaan bukanlah suatu proses yang terjadi secara alamiah, akan tetapi merupakan suatu proses yang sengaja dibuat dan berlangsung terus-menerus yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok atau komunitas. Menurut Pranarka proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kecenderungan ini disebut kecenderungan primer dari

⁴⁵*Ibid*, h.9.

⁴⁶Gunawan Sumoharjodiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*, (Jakarta : Bina Rena Pariwisata, 1997), h.165.

⁴⁷Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 156.

proses pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan *Kedua* atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Pengklasifikasian di atas bukanlah bentuk yang kaku, karena ada suatu kondisi tertentu yang menyebabkan proses pemberdayaan tersebut harus terkait satu dengan yang lain. Apalagi bentuk pemberdayaan tersebut terkait dengan bidang sosial, ekonomi, kecenderungan kedua nampak lebih relevan tetapi perlu juga memasukkan kecenderungan pertama untuk melengkapi.⁴⁸

Dalam prakteknya pekerja sosial yang berbasiskan pemberdayaan baik pekerja sosial maupun klien melakukan pendekatan kerja bersama sebagai mitra kolaboratif bagi klien, kerjasama kolaboratif berarti merupakan aktualisasi pemberdayaan.

Proses pemberdayaan secara umum berdasar konsep di atas meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Merumuskan relasi kemitraan
- b. Mengartikulasikan tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada
- c. Mendefinisikan arah yang ditetapkan
- d. Mengeksplorasi sistem yang ditetapkan
- e. Menganalisis kapabilitas sumber
- f. Menyusun frame pemecahan masalah

⁴⁸*Ibid*, h. 156.

- g. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperkuat kesempatan-kesempatan
- h. Mengakui temuan-temuan
- i. Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.⁴⁹

Pemberdayaan ekonomi secara umum merupakan proses yang sengaja dilakukan terus-menerus yang dilakukan pada individu atau kelompok dan organisasi. Dapat di katakan pemberdayaan ekonomi yang sempurna, apabila dapat melaksanakan proses-proses sesuai teori di atas.

Dalam arus perubahan sosial sekarang ini, pembicaraan tentang peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi penting untuk dianalisis. Hal itu karena sampai sekarang pesantren masih menjadi magnet sosial yang dapat menarik berbagai pihak untuk berakomodasi bahkan menumbuhkan vitalitas dan sumber inspirasi baru dalam menghadapi tantangan modern dewasa ini.⁵⁰

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Jadi pemberdayaan adalah sebuah proses dengan nama orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dengan mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup kuat untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi

⁴⁹*Ibid*, h. 158-159.

⁵⁰*Ibid*, h. 160.

perhatiannya. Sedangkan menurut beberapa ahli pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.⁵¹

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti : kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁵²

Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.⁵³

3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat ada dua yaitu: *pertama*, mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang dan *kedua*, untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut

⁵¹Edi Suharto, *Op.Cit*, h.58.

⁵²*Ibid*, h.60.

⁵³*Ibid*, h.62.

meliputi kemandirian berfikir, bertindak akan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.⁵⁴

Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.⁵⁵ Dengan kata lain tujuan dari pemberdayaan merupakan suatu langkah yang diambil untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih baik memanfaatkan potensi yang ada pada diri masyarakat itu sendiri sehingga mereka dapat memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan sesuai dengan apa yang di inginkan dan di butuhnya.

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan, pada intinya bertujuan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.⁵⁶

Dari teori di atas dapat di pahami bahwa suatu proses pemberdayaan bertujuan untuk membantu rekan kerja dalam mengambil keputusan, dan mengurangi hambatan dalam melakukan tindakan. Oleh karena itu, rasa percaya diri timbul akibat adanya bantuan dari rekan kerja.

⁵⁴Todaro, Michael P, dan Smith Stephen C, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 21.

⁵⁵*Ibid*, h.21.

⁵⁶ Agus Ahmad Syafi'i, *Op.Cit*, h. 39.

4. Tahapan Pemberdayaan Ekonomi Secara Umum

Pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) tahap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan: pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahap pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap pemformalisasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu

memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyanggand dana.

- e. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: dalam upaya program pemberdayaan masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
- f. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan tersebut diharapkan dengan jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunikasi untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- g. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Petugas harus tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin. Kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.⁵⁷

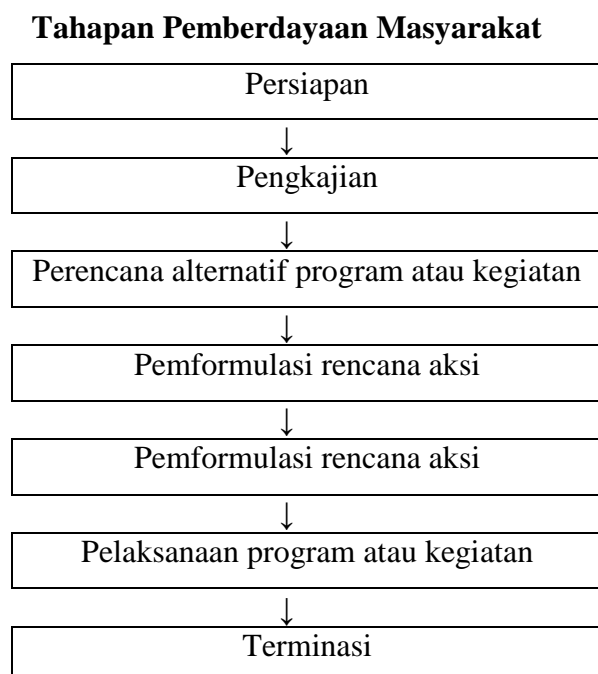
Dalam pemberdayaan ekonomi secara umum memiliki tahap-tahap pemberdayaan yang dapat di terapkan, yaitu tahap persiapan, pengkajian,

⁵⁷ *Ibid*, h. 63.

perencanaan alternatif program atau kegiatan, pemformalisasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Dari 7 tahap pemberdayaan di atas dapat dikatakan pemberdayaan yang efektif apabila semua tahap pemberdayaan berjalan baik dan lancar.

Adapun bagan dari model tahapan pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1



Sumber: Adi Isbandi Rukminto 2001

Ada tiga tahapan dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan

akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.

3. Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi.⁵⁸

Tujuan di ciptakan tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk menciptakan suasana iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Memperkuat potensi daya masyarakat agar melakukan hal-hal yang lebih positif dan nyata, dan masyarakat sebaiknya memanfaatkan ada peluang di lingkungan sekitar.

D. Pemberdayaan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Menurut Islam

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.⁵⁹

⁵⁸*Ibid*, h. 53.

⁵⁹Mathoriq, dkk, "Aktualisasi Nilai Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2 No. 3, (Februari 2010), h. 427.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi dalam Islam merupakan suatu aspek yang sangat penting dimana didalamnya ditanamkan hal-hal yang bukan hanya bersifat duniawi namun juga akhirat. Dengan kata lain, pemberdayaan yang diciptakan memberikan sebuah manfaat, bukan hanya setiap individu namun bermanfaat untuk kelompok (masyarakat) sehingga membuatnya mandiri untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya dan juga umat agar menjadi lebih baik.

2. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Menurut Islam

Menurut Agus Efendi ada tiga tempat pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra rohaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama dihampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.⁶⁰

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan

⁶⁰Dian Iskandar Jaelani, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam”. *Eksyar*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2014), h. 19.

dijadikan area bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual.⁶¹

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, di perlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.⁶²

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan.⁶³ Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat Ali'Imran ayat 27 :

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمَاتِ ۖ وَتُخْرِجُ الْمَمَاتِ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَنْ دَشَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".⁶⁴

Dari ayat di atas terdapat tafsir sebagai berikut yaitu engkau masukan malam ke dalam siang sehingga siang menjadi lebih panjang dari pada malam,

⁶¹*Ibid*, h. 20.

⁶²*Ibid*, h. 20.

⁶³*Ibid*, h. 25.

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit dan Diponegoro, 2006), h.53.

dan engkau masukan siang ke dalam malam sehingga malam lebih panjang dari pada siang. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati seperti ayam dari telur, tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup seperti keluarnya telur dari ayam dan biji-bijian. Inilah siklus kehidupan yang engkau atur sedemikian rupa sesuai dengan kekuasaan-Mu. Dan dengan kekuasaan Mu juga, engkau berika rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki baik yang taat maupun yang tidak taat, baik yang mukim maupun yang kafir, tanpa perhitungan. Jika demikian, maka tidak seorang pun yang mampu mempertanyakan karunia yang diberikan kepada siapa pun, baik berupa kekuasaan, kekayaan, kemudian mencari rezeki, dan lain-lain.⁶⁵

. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan dikalangan umat Islam, bahwa Allah memberi rezeki kepada umat islam tanpa batas.⁶⁶ Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 26 :

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

Artinya: "Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, Padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit)".⁶⁷

Dari ayat di atas terdapat tafsir sebagai berikut yaitu Allah yang maha pemurah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi rezeki siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba Nya. Mereka yang ingkar

⁶⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 1)*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 174.

⁶⁶Dian Iskandar Jaelani, *Op.Cit*, h. 26.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 252.

bergembira ria dengan kebahagiaan hidup yang mereka peroleh di kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang berlangsung begitu singkat dibanding kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.⁶⁸

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai kemiskinan *absolut* sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (*kaffah*) ayat-ayat Tuhan.⁶⁹

Dari kedua ayat di atas dapat di pahami bahwa Allah memberi rezeki kepada hambanya tidak pandang bulu dan suku, hanya manusia yang tidak memanfaatkan rezeki yang di beli oleh Allah, sehingga manusia banyak sekali yang tidak bersyukur dan mengalami kemiskinan.

3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Menurut Islam

Berdasar pada uraian di atas dapat dipahami bahwa perwujudan dari pengakuan Islam akan kebebasan ekonomi dengan menentukan ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bertujuan untuk merealisasikan dua hal secara umum yaitu: *Pertama*, agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, demi terjaminnya hak negara (otoritas) dalam ikut campur baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu, maupun untuk mengatur (mengintervensi) atau melaksanakan berbagai macam

⁶⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Op.Cit*, h.685.

⁶⁹Dian Iskandar Jaelani, *Op.Cit*, h. 27.

kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu atau tidak mampu dijalankan dengan baik.⁷⁰

Uraian tersebut menjelaskan kepada kita bahwa persoalan-persoalan yang berkenaan dengan masalah ekonomi telah diatur dalam Islam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa aturan Islam tentang ekonomi termasuk aturan yang sempurna dan lengkap. Oleh karena itu, pengaplikasian sistem ekonomi Islam dalam tatanan perekonomian umat kemungkinan besar akan lebih membawa kepada kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri.⁷¹

Pengembangan ekonomi dalam Islam mengindikasikan bahwa perhatian Islam terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari syariah dan yang menjadi tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan sistem dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan.⁷²

Agar pengembangan ekonomi dapat merealisasikan tujuan syariah, maka seidealnya jika dia memiliki beberapa kriteria, yang terpenting diantara kriteria-kriteria merupakan sebagai berikut:⁷³

- a. Pengembangan ekonomi dalam ekonomi Islam tidak akan dapat merealisasikan tujuannya jika tidak dijalankan secara komprehensif.

⁷⁰Muhammad Ramadhan Yusuf, *Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 35

⁷¹*Ibid*, h. 35.

⁷²*Ibid*, h. 36.

⁷³*Ibid*, h. 37.

- b. Sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat penghidupan umat merupakan tuntutan dalam syariah.
- c. Idealnya, pengembangan ekonomi dalam Islam mencakup semua lapisan masyarakat.
- d. Pengembangan ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan syariah dan ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah jika dilakukannya dengan ikhlas karena-Nya.
- e. Sesungguhnya sistem ekonomi yang mengedepankan keuntungan (*income*) tidak dibenarkan jika berakibat terhadap rusaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.
- f. Sesungguhnya berbagai upaya pengembangan ekonomi pada masa Umar *Radiyallahu Anhu* terfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat.

Peningkatan kualitas perekonomian akan terealisasi dengan terwujudnya lingkungan yang Islami dalam segala aspek kehidupan, diantara aspek-aspek sentral yang mendukung upaya tersebut yaitu sebagai berikut :⁷⁴

1. Kesalehan Umat

Realisasi dari kesalehan umat yaitu dengan mengimani Islam sebagai akidah dan syariah, dan pengaplikasiannya dalam segala aspek kehidupan. Sebab ketika seorang muslim meyakini bahwa dia sebagai khalifah dalam kehidupan ini, yang diantara tujuannya yaitu untuk memakmurkan bumi dan mengembangkannya, maka keyakinannya ini akan memotivasinya untuk mengembangkan ekonomi yang

⁷⁴H. Asmuni Sholihan, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Jakarta: Khalifah, 2006), h. 393.

merupakan bagian dari tugasnya dalam kehidupan ini. Bahkan jika dilakukannya dengan ikhlas, maka akan menjadi ibadah yang mendekatkan muslim kepada Allah swt.⁷⁵

2. Kebaikan Sistem Pemerintah

Sistem pemerintah merupakan perangkat politik dan apa yang muncul darinya sangat tergantung pada sistem pemerintah. Sebab dengan kualitas perangkat politik, kebaikan hubungan antara rakyat dan pemerintah, maka akan mendorong pengembangan ekonomi pada jalan yang semestinya. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa tugas terpenting pemerintah dalam upaya peningkatan taraf ekonomi ummat yaitu sebagai berikut:

- a) Menjaga agama, yaitu dengan cara menerapkan hukum-hukum yang sesuai dengan syari'at.
- b) Memberikan jaminan terhadap harta kaum muslimin, yaitu dengan cara mengelola sesuai dengan hukum syariah.
- c) Menegakkan keadilan dengan cara merealisasikan keamanan dan ketentraman.⁷⁶

3. Adil

Pengembangan ekonomi tidak akan terwujud tanpa ditegakkannya keadilan, karena kezaliman merupakan sebab hilangnya nikmat dan datangnya adzab. Umar *Radiyallahu Anhu* menjelaskan dampak kezaliman terhadap kehidupan

⁷⁵ *Ibid*, h. 393.

⁷⁶ *Ibid*, h. 394.

dengan mengatakan,” Tertahannya hujan disebabkan hakim yang jahat dan pemimpin yang zalim”.⁷⁷

4. Kebebasan dan Persamaan

Isu tentang kebebasan dan persamaan bukanlah hanya sebatas teori dan konsep belaka, namun pembicaraan tentang hal yang dinamis, menyentuh semua aspek kehidupan individu dan kelompok, serta berdampak pada perjalanan umat.

Sebab keadilan mengharuskan persamaan diantara manusia dalam segala bidang, sesuai dengan firman Allah, dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*⁷⁸

Dari ayat di atas terdapat tafsir sebagai berikut yaitu Wahai semua sungguh, kami telah menciptakankamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaanya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian kami jadikan, kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain,

⁷⁷Ibid, h. 394.

⁷⁸Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 517.

bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan. Karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena untuk berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi, Mahateliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya.⁷⁹

5. Keamanan dan Ketentraman

Al-quran memberikan prioritas yang setara terhadap pentingnya kemakmuran dan keamanan dan ketentraman. Hal ini senada dengan berfirman Allah dalam surat Quraisy ayat: 3-4, yang artinya yaitu sebagai berikut:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

Artinya: "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan".⁸⁰

Dari ayat di atas terdapat tafsir sebagai berikut yaitu mereka pergi berniaga tiap tahundengan aman dan sentosa. Oleh karena itu hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Kakbah, dengan pengabdian yang hakiki dan tidak mempersekutukan-Nya, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah mereka terima. Hendaklah mereka menyembah Tuhan yang telah

⁷⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 2)*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 655-656.

⁸⁰Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 602.

memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan mengamankan mereka dari rasa ketakuta. Terpenuhinya ke butuhan akan makanan dan rasa aman merupakan dua prasyarat penting yang menjamin kesejahteraan suatu masyarakat.⁸¹

Para pakar ekonomi modern juga menyadari hubungan antara keamanan dan pengembangan ekonomi, dimana mereka mengaitkan konsep pengembangan ekonomi dengan keamanan, hal ini, “Keamanan merupakan syarat untuk mewujudkan pengembangan ekonomi. Begitu juga sebaliknya tanpa pengembangan ekonomi, maka tidak mungkin ada keamanan. Karena itu negara-negara berkembang yang “tertinggal” yang tidak merealisasikan pengembangan ekonomi tidak merasakan adanya jaminan keamanan”.⁸²

4. Keunggulan Pemberdayaan Ekonomi Menurut Islam

Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam kosepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan), konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada menghapuskan penyebab kemiskinan bukan pada penghapusan kemiskinan semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara. Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat bisa mampu mengatasi

⁸¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Op.Cit*, h.1006.

⁸²Buchori Alma, *Op.cit*, h. 40-41.

permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah niali yang terpuji.⁸³

Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia".⁸⁴

Dari ayat di atas terdapat tafsir sebagai berikut yaitu tidak saja mengetahui sesuatu yang tersembunyi di malam hari dan yang tampak di siang hari, Allah melalui malaikat-Nya, juga mengawasi dengan cermat dan teliti. bagiNya, yakni bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga dan mengawasi nya secara bergiliran, dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaga dan mengawasi nya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa tidak akan mengubah keadaan suatau kaum dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, sebelum mereka mengubah keadaan diri menyangkut sikap mental dan pemikiran mereka sendiri. Dan apabila, yakni andai kata Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum dan ini adalah hal yang mustahil bagi Allah maka tak ada

⁸³*Ibid*, h. 28.

⁸⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 250.

kekuatan apa pun yang dapat menolaknya dan tidak ada yang dapat menjadi pelindung bagi mereka selain Dia.⁸⁵

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa setiap manusia kapan pun dan di mana pun tidak akan seorang diri, karena malaikat-malaikat selalu menemaninya setiap saat. Dan apabila hamba-Nya melakukan suatu keburukan, maka keburukan itu tidak dapat disembunyikan dan harus di pertanggung jawabkan di akhirat nanti. Dan tidak ada perlindungan bagi orang yang telah melakukan keburukan selain Allah yang melindunginya.

E. Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

1. Pengertian Pemberdayaan Pesantren

Pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya membantu sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Itu berarti bahwa pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk memandirikan keluarga, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki keluarga. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau *breakdown* dari hubungan antara subyek dan obyek.⁸⁶

Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan keluarga baik yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan keluarga harus di pandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi keluarga.⁸⁷

⁸⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Op.Cit*, h.680.

⁸⁶ Ruslan Abdul Ghofur, Nasruddin, Iskandar Syukur, *Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Ekonomi Pesantren*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

⁸⁷ *Ibid*, h. 9.

Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.⁸⁸

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pesantren setidaknya memiliki tiga motif, *Pertama*, motif keagamaan, karena kemiskinan bertentangan dengan etika sosial ekonomi Islam. *Kedua*, motif sosial, karena kyai juga seorang pemimpin yang harus mengatasi krisis ekonomi setempat. *Ketiga*, motif politik, karena pemegang kekuasaan setempat mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi pada tingkat mikro dan makro. Pondok pesantren dalam fungsinya melayani masyarakat, dapat pula dilihat dari upayanya dalam melayani masyarakat, terutama kebutuhan untuk menanggapi persoalan-persoalan kemiskinan, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat dan sebagainya. Di sinilah bisa ditunjukkan betapa pentingnya kehadiran pesantren yang tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan masyarakat sekitar lebih mendapat tempat dalam kerangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.⁸⁹

⁸⁸*Ibid*, h. 9-10.

⁸⁹Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. VI No. 1 (Mei 2015), h. 49-50.

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:⁹⁰

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Dia juga mengutip pendapat dari Parsons, bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana, masyarakat akan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi, berbagi pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

⁹⁰Ruslan Abdul Ghofur, Nasruddin, Iskandar Syukur, *OP.Cit*, h.11-12.

Pemberdayaan menekankan pada masyarakat untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁹¹ Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.⁹²

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya yakni masyarakat yang memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.⁹³

Keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek, yaitu:⁹⁴

⁹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), H.57-58.

⁹² *Ibid*, h.58.

⁹³ *Ibid*, h.60.

⁹⁴ Kesi widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No 1 (Juni 2011), H.18.

1. Kemampuan dalam pengambilan keputusan
2. Kemadirian
3. Kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan

Sedangkan proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Sedangkan proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama.⁹⁵

Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa manusia didorong untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁹⁶

Dari ayat di atas terdapat tafsir sebagai berikut yaitu apabila salat wajib telah di laksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid, maka bertebaranlah kamu di bumi, kembali bekerja dan berbisnis, carilah karuania

⁹⁵Ibid, h. 19.

⁹⁶Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.554.

Allah, rezeki yang halal, berkah, dan melimpah dan ingatlah Allah banyak-banyak ketika salat maupun ketika bekerja atau berbisnis agar kamu beruntung, menjadi pribadi yang seimbang serta sehat mental fisik.⁹⁷

Lembaga keagamaan memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut:⁹⁸

- a. Potensi sumber daya manusia dengan tokoh agama yang kharismatik dan merupakan panutan serta kepercayaan setempat.
- b. Potensi sumber daya alam, terutama bagi lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki lahan luas.
- c. Potensi kelembagaan, terutama lembaga-lembaga keagamaan yang telah berdiri lama dan memiliki jumlah anggota yang besar dan tersebar di mana-mana.
- d. Potensi pasar, mengingat adanya hubungan sosial dan kekerabatan antara lembaga keagamaan dengan masyarakat sekitar.
- e. Potensi teknologi sebagai sarana di mana lembaga keagamaan merupakan lembaga strategis untuk mengembangkan teknologi.

Pesantren juga mampu memainkan sarana dalam pembangunan. Terdapat tiga jenis sarana yang dapat di terapkan oleh pesantren yaitu:⁹⁹

⁹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Op.Cit*, h.788.

⁹⁸ Hanani, Nuhfil, "Peranan Kelembagaan dalam Pengembangan Agribisnis". *Jurnal Agribisnis*, Vol. II No. 1 (Desember 2005) h.112.

⁹⁹ Sulthon, Masyhud, Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), h.13.

- 1) Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat (*grassroots*) yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan politik secara meluas, melalui jaringan, kerjasama, baik dalam suatu negara maupun lembaga-lembaga internasional lainnya.
- 3) Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa kegagalan sistem perekonomian Indonesia ialah adanya kebijakan pemerintah mengenai sistem ekonomi konglomerasi. Sistem ekonomi berbasis konglomerasi ini kenyatannya hanya menguntungkan orang atau kelompok yang telah memiliki kemampuan dan akses ekonomi sehingga hanya merekalah yang untung. Sementara itu, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan akses, tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menguntungkan usahanya.¹⁰⁰

Setelah kegagalan sistem ekonomi konglomerasi, maka harapan ekonomi itu ditumpahkan ke lembaga-lembaga rakyat yang sudah teruji dan lulus dalam sejarah kehidupan masyarakat dan berbangsa. Ternyata, yang justru tahan di tengah badai krisis ekonomi adalah lembaga-lembaga ekonomi mikro yang berbasis rakyat. Industri kelas menengah kecil seperti home industri justru memiliki daya ketika berhadapan dengan krisis ekonomi.¹⁰¹

Pondok pesantren, kenyatannya adalah lembaga potensial untuk bergerak ke arah ekonomi berbasis rakyat, sebagaimana kekuatan yang dimilikinya. Jika

¹⁰⁰H. Nur Syam, *Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 248.

¹⁰¹*Ibid*, h. 248.

Pondok pesantren hanya menjadi penonton di era yang akan datang, maka lembaga-lembaga ekonomi mikro lain boleh jadi bergerak ke arah kemajuan. Oleh karena itu, kiranya diperlukan analisis yang cermat untuk melakukan penguatan kelembagaan ekonomi ini, agar tidak salah melangkah.¹⁰²

Sasaran akhir dari pemberdayaan ekonomi pondok pesantren adalah kemandirian pesantren. Selama ini pondok pesantren selalu dilabeli dengan nama lembaga pengedar proposal dana bantuan, baik pada institusi formal atau non formal. Labelling itu tentunya tidak mengenakan. Pondok pesantren akan terbebas dari anggapan itu kalau pondok pesantren menjadi lembaga yang kuat, terutama dalam sektor ekonomi. Dengan sen-dirinya, tidak setiap ada kegiatan, apakah membangun gedung atau kegiatan lain, tidak selalu sibuk mengedarkan proposal kesana-kemari.¹⁰³

3. Kendala Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Jusuf Irianto sebagaimana dikutip oleh Rr. Suhartini, masalah kualitas SDM sebetulnya bukan hanya masalah pondok pesantren saja, tetapi dalam skala yang lebih luas, yakni masyarakat Indonesia secara umum. Data tentang *Human Development Index* (HDI) yang disajikan *United Nations for Development Program* (UNDP) menunjukkan bahwa peringkat kualitas SDM di Indonesia tahun 2000 berada pada urutan 109. Peringkat Indonesia itu hanya satu tingkat lebih tinggi dari Vietnam yang menempati urutan 110, namun sangat jauh

¹⁰²*Ibid*, h. 249.

¹⁰³*Ibid*, h. 249-250.

berbeda dengan sesama negara anggota ASEAN lainnya. HDI Singapura berada di urutan 22, Brunai Darussalam berada di urutan 25, Malaysia berada di urutan 56, serta Thailand dan Philipina berada di urutan 67 dan 77.¹⁰⁴

Sementara itu, pada tahun 2000, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, sekitar 38,5 juta jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan 1,1 juta jiwa bila dibanding tahun 1999. Salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah pengangguran tersebut adalah terbatasnya kemampuan sektor riil dalam menyerap jumlah tenaga kerja yang semakin membesar.¹⁰⁵

Bagaimana dengan SDM Pondok Pesantren? Tanpa bermaksud intervensi terhadap eksistensi Pondok Pesantren, secara objektif harus diakui bahwa angka 38,5 juta jiwa pengangguran tersebut, sebagian di antaranya adalah komunitas alumni pondok pesantren. Kondisi ini sudah barang tentu bukan semata kesalahan para santri, tetapi akan lebih baik bila dilihatnya secara komprehensif, yakni dengan melihat bagaimana SDM pengelola lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Pesantren.¹⁰⁶

SDM di sini tentu saja tidak hanya meliputi kemampuan dasar akademis, tetapi juga kemampuan skill individual-kolektif. Perpaduan antar-kemampuan akademis dan skill individual-kolektif inilah yang pada saatnya sangat menentukan terhadap kualitas suatu produk. Dengan kata lain, Pesantren sebagai

¹⁰⁴Rr.Suhartini, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h.235.

¹⁰⁵*Ibid*, h.355.

¹⁰⁶Ahmad Faozan, "*Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi*". *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2006), h. 3.

sebuah *center of excellence*, seharusnya melengkapi kurikulum dan metodologinya, tidak hanya pada satu kemampuan, yaitu mencetak pemikir-pemikir agama, tetapi sekaligus praktisi-praktisi sosial dengan basis agama. Untuk keperluan inilah berbagai ilmu dan kemampuan terapan sangat dibutuhkan.¹⁰⁷

Menurut Toto Tasmara ada beberapa nilai yang selama ini menjadi penghambat etos kerja bagi orang Islam, di antaranya adalah:¹⁰⁸

- 1) Khurofat dan takhayul
- 2) Tak akan lari gunung dikejar, alon-alon asal kelakon
- 3) Gampangan, take it easy, bagaimana nanti sajalah
- 4) Mangan ora mangan pokoke kumpul
- 5) Nrimo-fatalistis
- 6) Kerja kasar itu hina
- 7) Jimat atau mascot.

Dari penjelasan diatas ada beberapa nilai menjadi penghambat etos kerja bagi orang Islam yaitu peribahasa yang selama ini kita sering dengar di kalangan masyarakat, dengan adanya peribahasa tersebut sangat menghambat pemikiran orang Islam dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya peribahasa tersebut, kebanyakan orang Islam sering menerapkan di kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu peribahasa tersebut, mencuci otak masyarakat atau memengaruhi orang Islam untuk bermalas-malasan bekerja.

¹⁰⁷*Ibid*, h. 3.

¹⁰⁸Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Jogjakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2005), h.125-133.

b. Kelembagaan

Secara garis besar, model kelembagaan Pondok Pesantren dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:¹⁰⁹

1) *Integrated Structural*

Maksudnya adalah semua unit atau bidang yang ada dalam Pondok Pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dengan Pondok Pesantren. Artinya, semua unit atau bidang dengan berbagai ragam spesifikasi, berada dalam suatu struktur organisasi. Model seperti ini, sebenarnya tidak terlalu bermasalah seandainya masing-masing unit atau bidang memiliki job discription yang jelas, termasuk hak dan kewenangannya. Sebaliknya, Apabila hal ini tidak dijumpai sementara kendali organisasi berpusat hanya pada satu orang (dan inilah yang banyak terjadi di Pondok Pesantren), maka dapat dipastikan bahwa sistem keorganisasian dan kelembagaan tidak bisa berjalan dengan baik. Istilah yang sering kita dengar “semuanya harus mendapat restu sang Kyai”. Inilah problem klasik kelembagaan yang biasanya banyak dijumpai di Pondok Pesantren. Meski demikian, Apabila figur Kyai yang demokratis, maka otoritarianisme kelembagaan dapat dihindarkan.¹¹⁰

2) *Integrated Non-Structural*

Maksudnya adalah unit atau bidang usaha yang dikembangkan Pondok Pesantren terpisah secara struktural organisatoris. Artinya, setiap bidang usaha mempunyai struktur tersendiri yang independen. Meski demikian, secara emosional dan ideologis tetap menyatu dengan Pondok Pesantren. Pemisahan

¹⁰⁹Rr. Suhartini, *Op.Cit*, h.237-240

¹¹⁰*Ibid*, h.240-241.

lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya kemandirian lembaga, baik dalam pengelolaan atau pengembangannya. Adapun kontribusi yang diberikan pada Pondok Pesantren, biasanya berupa semacam manajemen fee. Model kelembagaan seperti ini biasanya mengadopsi sistem manajemen modern. Karenanya, tolok-ukurnya adalah profesionalisme.¹¹¹

3) Terobosan/Inovasi dan *Net-Working*

Problem ketiga yang dirasa mendasar adalah kurangnya keberanian Pondok Pesantren untuk melakukan terobosan keluar, atau membuat jaringan, baik antar Pondok Pesantren maupun Pondok Pesantren dengan institusi lain. Kurangnya keberanian ini tidak terlepas dari dua problem yang ada, yaitu SDM dan kelembagaan, akibat lebih jauh, Pondok Pesantren tidak atau kurang maksimal memfungsikan dirinya sebagai *agent of development*. Agar dapat menjadi agen perubahan dan pemberdayaan, ada beberapa yang harus dipenuhi, antara lain: wawasan, komunikasi, kekuasaan atau kekuatan, politik, dan modalitas ekonomi.¹¹²

¹¹¹*Ibid*, h.241.

¹¹²*Ibid*, h.242.